Jurnal Identitas Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bandung
Vol. 6, No. 1, 31 Agustus 2026, pp. 113-123
E-ISSN: 2775-6262, P-ISSN: 2775-541X, DOI: 10.52496/identitas.v6i1.924

Collaborative Governance dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kebupaten Garut (Studi pada Kartu Identitas Anak)

Intan Widiarti[1], Yayan Andri[2], Meti Mediyastuti Sofyan[3], Ai Nunung[4]
[1234] Universitas Muhammadiyah Bandung
Email: yayan.andri@umbandung.ac.id, metimediya@umbandung.ac.id, ainunung@umbandung.ac.id

Abstrak

Peningkatan efektivitas pelayanan publik menjadi tantangan penting dalam tata kelola pemerintahan modern. Program Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai inovasi administrasi kependudukan bertujuan memberikan identitas resmi bagi anak sejak dini. Namun, implementasinya di Kabupaten Garut menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan infrastruktur. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan collaborative governance dalam pelayanan KIA di Disdukcapil Garut dengan pendekatan kualitatif studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan kolaborasi antara Disdukcapil, sekolah, HIMPAUDI, sektor swasta, dan masyarakat telah membentuk praktik collaborative governance yang efektif, terutama melalui layanan kolektif dan program jemput bola. Kendala seperti rendahnya pemahaman masyarakat dan keterbatasan SDM masih menjadi hambatan utama. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis terhadap penguatan model collaborative governance di sektor administrasi publik, serta rekomendasi praktis bagi pengembangan strategi kolaboratif yang lebih inklusif dan responsif.

Kata Kunci: Collaborative Governance, Pelayanan Publik, Kartu Identitas Anak, Disdukcapil, Kolaborasi Lintas Sektor.

Abstract

Enhancing the effectiveness of public service delivery has become a critical challenge in modern governance. The Child Identity Card (Kartu Identitas Anak, KIA) program, as an innovation in population administration, aims to provide children with an official identity from an early age. However, its implementation in Garut Regency faces various obstacles, including low community participation and limited infrastructure. This study aims to analyze the application of collaborative governance in KIA service delivery at the Garut Civil Registration and Population Agency (Disdukcapil Garut) using a qualitative case study approach. Data were collected through in-depth interviews and documentation. The findings indicate that collaboration among Disdukcapil, schools, the Indonesian Early Childhood Educators Association (HIMPAUDI), the private sector, and the community has formed effective collaborative governance practices, particularly through collective services and outreach-based (jemput bola) programs. Nevertheless, constraints such as low public awareness and limited human resources remain major challenges. This study provides a theoretical contribution to strengthening collaborative governance models in the public administration sector, as well as practical recommendations for developing more inclusive and responsive collaborative strategies.

Keywords: *Collaborative Governance; Public Service Delivery; Child Identity Card; Civil Registration and Population Agency; Cross-sector Collaboration*

Jurnal Identitas Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bandung
Vol. 6, No. 1, 31 Agustus 2026, pp. 113-123
E-ISSN: 2775-6262, P-ISSN: 2775-541X, DOI: 10.52496/identitas.v6i1.924

Pendahuluan

Pelayanan publik merupakan salah satu tanggung jawab fundamental pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan pentingnya penyediaan layanan yang efektif, inklusif, dan sesuai harapan masyarakat, termasuk di bidang administrasi kependudukan (Karmanis Karmanis, 2022). Adanya kerjasama orang-orang untuk mencapai tujuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa mereka telah melakukan proses administrasi, karena administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Aziz & Andri, 2021).

Dalam konteks ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) memegang peran strategis dalam menyediakan layanan dokumen identitas resmi, seperti Kartu Identitas Anak (KIA), yang dirancang untuk memberikan perlindungan hukum sekaligus mempermudah akses anak terhadap berbagai layanan publik (Rahmat & Pasciana, 2020); (Setia Putri et al., 2018)

Meskipun kebijakan KIA diatur secara rinci melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, minimnya sosialisasi, keterbatasan infrastruktur, serta hambatan prosedural menjadi faktor penghambat utama (Norarita et al., 2024). Di Kabupaten Garut, tantangan tersebut juga terlihat pada rendahnya kesadaran orang tua akan manfaat KIA dan koordinasi lintas pemangku kepentingan yang belum optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan yang memerlukan strategi inovatif untuk meningkatkan efektivitas pelayanan.

Salah satu pendekatan yang berpotensi menjembatani kesenjangan tersebut adalah *collaborative governance*, yakni model tata kelola kolaboratif yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam forum pengambilan keputusan bersama (Ansell & Gash, 2008); (Fatman et al., 2023). Pendekatan ini menekankan dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen bersama, kesepahaman tujuan, serta pencapaian hasil kolaboratif sebagai elemen kunci keberhasilan. Penelitian terdahulu

menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor mampu mengatasi keterbatasan sumber daya, meningkatkan transparansi, dan memperluas jangkauan layanan public (Bianchi et al., 2021); (Florini & Pauli, 2018).

Urgensi penerapan *collaborative governance* dalam layanan KIA di Kabupaten Garut tidak hanya didorong oleh kebutuhan untuk memperbaiki efektivitas administrasi kependudukan, tetapi juga untuk memperkuat perlindungan anak dan memastikan hak-haknya terpenuhi sejak dini. Pendekatan ini berpotensi memfasilitasi sinergi antara Disdukcapil, institusi pendidikan, organisasi profesi seperti HIMPAUDI, sektor swasta, dan masyarakat, sehingga layanan KIA dapat diakses lebih luas, cepat, dan efisien. Selain itu, kolaborasi yang terstruktur dapat mendorong inovasi layanan, seperti program jemput bola dan pelayanan kolektif di sekolah, yang terbukti meningkatkan cakupan kepemilikan KIA di berbagai daerah (Burama, 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan collaborative governance dalam pelayanan public di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Garut, dengan focus pada implementasi program Kartu Identitas Anak. Studi ini mengevaluasi sejauh mana kolaborasi lintas sektor dijalankan, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya, serta hambatan yang dihadapi dalam proses kolaboratif. Penelitian ini menggunakan teori *collaborative governance* (Ansell & Gash, 2008) sebagai kerangka analisis, dengan lima indicator utamanya, yakni *face to face dialogue, trust building, commitment to process, share understanding dan intermediate outcomes.* Dan diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian collaborative governance dalam konteks pelayanan publik di Indonesia. Selain itu, secara praktis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis bagi Disdukcapil Kabupaten Garut dan para pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi program KIA. Melalui pendekatan kolaboratif yang lebih terintegrasi, diharapkan program KIA dapat berjalan optimal sebagai bentuk perlindungan identitas anak serta mndukung terwujudnya pelayanan public yang lebih adil dan inklusif di tingkat lokal.

Jurnal Identitas Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bandung
Vol. 6, No. 1, 31 Agustus 2026, pp. 113-123
E-ISSN: 2775-6262, P-ISSN: 2775-541X, DOI: 10.52496/identitas.v6i1.924

Tinjauan Pustaka

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada formulasi kebijakan Program Sekolah Maung di Provinsi Jawa Barat. Menurut Creswell (2016), pendekatan kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan oleh sekelompok individu

Kajian teoritis penelitian ini berlandaskan pada teori-teori utama yang relevan dengan konsep *collaborative governance* dalam pelayanan publik, khususnya pada program Kartu Identitas Anak (KIA). Secara umum, kolaborasi didefinisikan sebagai proses interaksi antarorganisasi atau individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama melalui pertukaran informasi, koordinasi, dan integrasi sumber daya. Dalam perspektif administrasi publik, kolaborasi menjadi pendekatan strategis untuk mengatasi permasalahan kompleks yang tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja (Juniyanto, 2022).

Konsep *governance* sendiri menekankan pentingnya keterlibatan berbagai aktor, baik negara, sektor swasta, maupun masyarakat sipil, dalam perumusan dan implementasi kebijakan public (Sørensen & Triantafillou, 2016). Berbeda dengan konsep *government* yang bersifat hierarkis, governance memandang tata kelola sebagai jaringan aktor yang saling bergantung, berinteraksi secara berkelanjutan, dan mengedepankan negosiasi serta kepercayaan (Noor et al., 2019)

Collaborative governance, menurut Ansell & Gash (2008), merupakan proses pengambilan keputusan kolektif yang melibatkan lembaga publik dan aktor non-pemerintah dalam forum formal, berorientasi pada musyawarah untuk mufakat. Model ini dibangun atas enam karakteristik: inisiasi oleh lembaga publik, keterlibatan aktor lintas sektor, partisipasi dalam pengambilan keputusan, struktur terorganisir konsensus, serta fokus pada kebijakan publik. Lima indikator kunci pelaksanaannya meliputi *face-to-face dialogue*, *trust building*, *commitment to process*, *shared understanding*, dan *intermediate outcomes*.

Penelitian Terdahulu

Sejumlah studi telah menelaah penerapan collaborative governance di berbagai konteks. Ansell & Gash (2008) mengidentifikasi bahwa kejelasan tujuan, pencapaian awal, dan komunikasi langsung merupakan faktor kunci keberhasilan kolaborasi. (Bianchi et al., 2021) menemukan bahwa kepemimpinan efektif dan pengurangan biaya

transaksi menjadi penentu keberhasilan implementasi model ini. (Florini & Pauli, 2018) menekankan peran kolaborasi lintas sektor dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), sementara (Bonny & Cahlikova, 2025) menunjukkan pentingnya kejelasan peran dan kepemimpinan dalam proyek pendidikan digital berbasis kolaborasi.

Dalam konteks sosial, (Bae & Choi, 2024) membuktikan hubungan positif collaborative governance terhadap kinerja ekonomi dan sosial *social startups*. Penelitian di sektor administrasi kependudukan juga menunjukkan relevansinya: (Ekawati et al., 2023) di Kabupaten Natuna dan (Hanyfa & Eni Rustianingsih, 2024) di Desa Kesamben Kulon mengidentifikasi hambatan geografis, keterbatasan SDM, dan perlunya perjanjian formal dalam kolaborasi. Sementara itu, (Warsyena & Wibisono, 2021) menyoroti model *Triple Helix* untuk mengoptimalkan pelayanan publik kependudukan.

Penelitian terkait program KIA secara khusus dilakukan oleh (Setia Putri et al., 2018) di Kabupaten Karimun dan (Prameswari et al., 2023) di Sidoarjo. Hasilnya menunjukkan bahwa program KIA secara umum diterima baik, namun masih terkendala rendahnya jangkauan layanan, minimnya sosialisasi, dan keterbatasan sumber daya.

Kesenjangan Penelitian

Meskipun penelitian terdahulu telah membahas collaborative governance dalam berbagai sektor, masih terdapat kekosongan kajian pada integrasi konsep ini dalam pelayanan administrasi kependudukan yang spesifik, seperti program KIA, di tingkat kabupaten. Sebagian besar studi fokus pada aspek teknis pelayanan atau kerangka teoritis umum, tanpa menguraikan secara mendalam interaksi dan peran pemangku kepentingan lintas sektor dalam meningkatkan efektivitas layanan KIA. Selain itu, kajian empiris yang menggabungkan perspektif kolaborasi dengan analisis hambatan implementasi di tingkat daerah masih terbatas.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretatif, yang dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena *Collaborative Governance* dalam pelayanan publik. Pendekatan ini relevan karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi interaksi aktor, konteks kebijakan, dan dinamika kolaborasi secara holistik sesuai dengan tujuan penelitian (Cresswell, 2014)

Penelitian dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, berfokus pada proses pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA). Lokasi ini dipilih

Jurnal Identitas Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bandung
Vol. 6, No. 1, 31 Agustus 2026, pp. 113-123
E-ISSN: 2775-6262, P-ISSN: 2775-541X, DOI: 10.52496/identitas.v6i1.924

karena merupakan instansi pelaksana program KIA sekaligus pusat koordinasi berbagai aktor yang terlibat. Kegiatan penelitian berlangsung pada Januari hingga Juni 2025, mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, dan analisis.

Populasi penelitian meliputi seluruh pihak yang berperan dalam implementasi KIA, baik dari unsur pemerintah, pihak sekolah, maupun masyarakat. Pemilihan informan dilakukan melalui *purposive sampling* dengan mempertimbangkan relevansi pengetahuan dan keterlibatan mereka dalam program. Sebanyak 8 informan kunci ditetapkan, termasuk pejabat struktural Disdukcapil, petugas teknis, perwakilan sekolah, dan orang tua. Jumlah tersebut dianggap memadai untuk mencapai kedalaman data dan variasi perspektif.

Instrumen penelitian utama adalah peneliti sendiri dengan panduan wawancara semi-terstruktur yang memuat indikator-indikator *Collaborative Governance* berdasarkan model Ansell dan Gash (2008). Validitas data dijaga melalui *triangulasi* sumber dan teknik, sementara keandalan diperoleh dengan penggunaan pedoman wawancara yang konsisten pada semua informan.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung pada kegiatan pelayanan KIA, dan telaah dokumen terkait seperti peraturan daerah, laporan kegiatan, serta notulensi rapat koordinasi. Prosedur pengumpulan data mengikuti tahapan persiapan instrumen, pelaksanaan wawancara dan observasi, pencatatan hasil lapangan, dan verifikasi awal temuan kepada informan.

Analisis data dilakukan secara interaktif dengan model (Miles et al., 2014) yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Seluruh proses analisis dilakukan secara manual dengan bantuan perangkat lunak Microsoft Word untuk pengorganisasian catatan lapangan.

Hasil dan Pembahasan

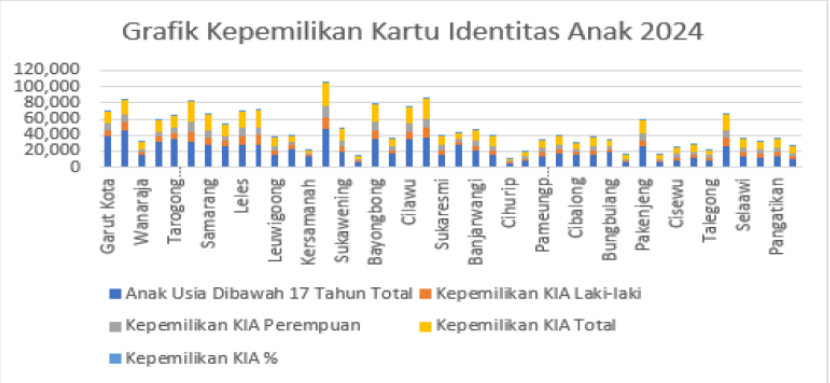
Penelitian ini menemukan bahwa penerapan *collaborative governance* dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut berjalan secara cukup efektif, ditandai dengan adanya kolaborasi yang melibatkan pemerintah daerah, instansi vertikal, serta masyarakat. Proses kolaborasi mencakup tahap inisiasi, fasilitasi, dan implementasi program pelayanan, yang dilandasi komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas layanan.

Data menunjukkan bahwa indikator partisipasi aktor berjalan baik, dengan

Jurnal Identitas Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bandung
Vol. 6, No. 1, 31 Agustus 2026, pp. 113-123
E-ISSN: 2775-6262, P-ISSN: 2775-541X, DOI: 10.52496/identitas.v6i1.924

keterlibatan aktif dari berbagai pihak dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan layanan. Indikator komunikasi antar pemangku kepentingan dinilai cukup intensif, meskipun masih terdapat kendala koordinasi lintas sektor. Sementara itu, kepercayaan dan komitmen antar pihak berada pada tingkat tinggi, yang mempengaruhi kelancaran program.

Grafik 4. 1 Kepemilikan Kartu Identitas Anak 2024



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

Dari grafik diatas menunjukan bahwa kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Garut sudah mencapai 59.95% dari total 867.340 anak, artinya sebanyak 519,591 anak telah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, terjadi peningkatan signifikan dalam kepemilikan Kartu Identitas Anak pada rentang waktu tahum 2023 hingga 2024. Yang mana peningkatan ini tidak dapat dilepas dari berbagai Upaya strategi yang dilakukan Disdukcapil melalui pendekatan kolaboratif dengan beragai mitra, seperti Pendidikan dan sektor swasta.

Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, adaptasi terhadap perubahan regulasi, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap prosedur administrasi kependudukan. Namun, strategi penguatan kapasitas aparatur dan sosialisasi yang intensif telah membantu mengurangi hambatan tersebut.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa *collaborative governance* mampu mendorong inovasi pelayanan publik, mempercepat proses administrasi, dan meningkatkan kepuasan masyarakat, meskipun optimalisasi koordinasi lintas sektor masih menjadi tantangan utama.

Jurnal Identitas Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bandung
Vol. 6, No. 1, 31 Agustus 2026, pp. 113-123
E-ISSN: 2775-6262, P-ISSN: 2775-541X, DOI: 10.52496/identitas.v6i1.924

Mengacu pada lima indikator *collaborative governance* dari Ansell & Gash (2008), temuan penelitian dapat dirinci sebagai berikut:

1. ***Face-to-Face Dialogue*** **(Dialog Tatap Muka)** Pertemuan langsung antara pihak Disdukcapil, sekolah, HIMPAUDI, dan mitra swasta mempermudah pertukaran informasi, pemecahan masalah, dan koordinasi teknis. Dialog ini memungkinkan semua pihak memahami prosedur pembuatan KIA dan membangun strategi bersama. Meski demikian, intensitas pertemuan masih terbatas pada momentum kegiatan tertentu, sehingga kesinambungan komunikasi perlu diperkuat.
2. ***Trust Building*** **(Membangun Kepercayaan)** Kepercayaan terbentuk melalui konsistensi pelayanan gratis, transparansi prosedur, serta respons cepat terhadap kendala teknis. Masyarakat mulai memandang Disdukcapil sebagai institusi yang peduli pada perlindungan anak. Namun, tantangan muncul ketika terdapat keterlambatan akibat kendala teknis sistem, yang dapat mengurangi tingkat kepercayaan jika tidak segera diatasi.
3. ***Commitment to Process*** **(Komitmen dalam Proses)** Semua pihak menunjukkan komitmen melalui penyediaan sumber daya dan keterlibatan aktif dalam pengumpulan berkas, verifikasi data, hingga pencetakan KIA. Disdukcapil juga menetapkan target penerbitan KIA tahunan. Kendati demikian, komitmen ini masih terganggu oleh keterbatasan SDM yang harus menangani beban kerja administrasi lain selain KIA.
4. ***Shared Understanding*** **(Pemahaman Bersama)** Kesepahaman terbangun melalui sosialisasi yang menekankan manfaat KIA sebagai identitas resmi anak dan akses layanan publik. Akan tetapi, sebagian masyarakat masih menganggap KIA hanya sekadar pelengkap, bukan kebutuhan mendasar. Hal ini menunjukkan perlunya strategi komunikasi publik yang lebih kreatif dan berbasis kebutuhan warga.
5. ***Intermediate Outcomes*** **(Hasil Antara)** Dampak positif kolaborasi terlihat dari meningkatnya jumlah penerbitan KIA setiap tahun, khususnya di wilayah yang dijangkau program jemput bola. Adanya insentif seperti diskon di tempat wisata dan merchant tertentu menjadi daya tarik tambahan. Meski demikian, kesenjangan kepemilikan KIA masih tinggi di daerah terpencil yang minim akses transportasi dan informasi.

Jurnal Identitas Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bandung
Vol. 6, No. 1, 31 Agustus 2026, pp. 113-123
E-ISSN: 2775-6262, P-ISSN: 2775-541X, DOI: 10.52496/identitas.v6i1.924

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan collaborative governance dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi telah berjalan secara efektif melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait. Kolaborasi ini tercermin dari koordinasi yang intensif, keterlibatan aktif berbagai aktor, serta mekanisme komunikasi yang adaptif, sehingga mampu meningkatkan efisiensi pelayanan dan kepuasan masyarakat. Temuan ini menguatkan teori collaborative governance yang menekankan pentingnya partisipasi multiaktor, transparansi, dan pembagian peran yang proporsional dalam tata kelola publik.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa penerapan tata kelola kolaboratif dapat menjadi strategi efektif untuk mengatasi tantangan pelayanan publik yang kompleks, khususnya pada sektor administrasi kependudukan. Kontribusi ilmiah dari studi ini terletak pada pengayaan literatur mengenai praktik collaborative governance di tingkat pemerintah daerah, yang sebelumnya masih terbatas pada konteks layanan publik tertentu. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan eksplorasi lebih mendalam terkait faktor-faktor penghambat dan pendukung kolaborasi di berbagai daerah dengan karakteristik sosial, politik, dan budaya yang berbeda. Selain itu, kajian longitudinal dapat dilakukan untuk menilai keberlanjutan efektivitas collaborative governance dari waktu ke waktu, sehingga dapat memberikan gambaran lebih komprehensif tentang daya tahannya dalam dinamika pelayanan publik.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan eksplorasi lebih mendalam terkait faktor-faktor penghambat dan pendukung kolaborasi di berbagai daerah dengan karakteristik sosial, politik, dan budaya yang berbeda. Selain itu, kajian longitudinal dapat dilakukan untuk menilai keberlanjutan efektivitas collaborative governance dari waktu ke waktu, sehingga dapat memberikan gambaran lebih komprehensif tentang daya tahannya dalam dinamika pelayanan publik.

Daftar Pustaka

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Aziz, Y. M. A., & Andri, Y. (2021). Collaboration of Policy Handling Citarum Harum in Bandung District. International Journal of Innovation, Creativity and Change, 15(9), 750–764. https://www.ijicc.net/images/Vol_15/Iss_9/15967_Aziz_2021_E_R.pdf

Bae, B., & Choi, S. (2024). The effect of collaborative governance in social startups on social performance: The mediating effect of economic performance. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 10(3), 100370. https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2024.100370

Bianchi, C., Nasi, G., & Rivenbark, W. C. (2021). Implementing collaborative governance: models, experiences, and challenges. Public Management Review, 23(11), 1581–1589. https://doi.org/10.1080/14719037.2021.1878777

Bonny, S., & Cahlikova, T. (2025). Evaluating the effects of collaborative governance: Case of a digital education project. Evaluation and Program Planning, 109(October 2024). https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2024.102522

Burama, F. C. (2024). Disdukcapil Garut Jelaskan Fungsi KIA untuk Identitas Resmi Anak, Jangan Dianggap Sepele. Radargarut.Id. https://radargarut.id/2024/12/23/disdukcapil-garut-jelaskan-fungsi-kia-untuk-identitas-resmi-anak-jangan-dianggap-sepele/2/

Cresswell, J. W. (2014). Research Design Qualitative, Quantitative, and Mix Methods Approaches. SAGE Publications Inc.

Ekawati, S., Suprajoga, T., & Aisyah, S. (2023). Collaborative Government Dalam Pelayanan Aisyahrani, A. (2024). Pengembangan Pendidikan Karakter di Sekolah untuk Membentuk Generasi Muda yang Unggul. Vol. 1 No, 1–12. Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna. Jurnal Ilmiah Mandala Education, 9(2), 999–1007. https://doi.org/10.58258/jime.v9i2.4934

Fatman, J. H., Nurlinah, N., & Syamsu, S. (2023). Pelayanan Publik Berbasis Collaborative Governance Di Pelabuhan Andi Mattalata Kabupaten Barru. Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, 9(1), 120–134. https://doi.org/10.26618/kjap.v9i1.10515

Florini, A., & Pauli, M. (2018). Collaborative governance for the Sustainable Development Goals. Asia and the Pacific Policy Studies, 5(3), 583–598. https://doi.org/10.1002/app5.252

Hanyfa, M. R., & Eni Rustianingsih. (2024). Collaborative Governance Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Bagi Masyarakat Miskin Di Desa Kesamben Kulon. Journal Publicuho, 7(3), 1471–1488. https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.507

Juniyanto, J. (2022). Kolaborasi Antar Perangkat Daerah di Pemerintahan Daerah Kabupaten Gunungkidul. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 008(01), 45–64. https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2022.008.01.5

Karmanis Karmanis. (2022). Reformasi Pelayanan Publik Di Negara Berkembang Dan Negara Maju. MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang, 19(2), 19–28. https://doi.org/10.56444/mia.v19i2.581

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis A Method Sourcebook. SAGE Publications Inc.

Noor, M., Dalih, S., & Antun, M. (2019). Collaborative Governance. In Sustainability (Switzerland) (Vol. 11, Issue 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

Norarita, Arsyad, M., & Fajar Noorrahman, M. (2024). Efektivitas Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sungai Hulu Utara. Jurnal Pelayanan Publik, 1(x), 37–44.

Prameswari, M., Pramono, S., & Roekminiati, S. (2023). Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kartu Identitas Anak di Kantor Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial, 6(2), 154–170. https://doi.org/10.25139/jmnegara.v6i2.5225

Rahmat, I. R., & Pasciana, R. (2020). Online Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. 25–44.

Setia Putri, I., Samin, R., Hendrayady, A., Raja Ali Haji, M., Riau, K., Magister Ilmu Aministrasi Negara Universitas Maritim Raja Ali Haji, P., & Ilmu Administrasi Negara Universitas Maritim Raja Ali Haji, P. (2018). Evaluasi Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun Evaluation of Implementation of Child Identity Card Program By the Ministry of Education and Civil Registration of Karimun District. 5. http://dx.doi.org/10.46730/jiana.v20i2

Sørensen, E., & Triantafillou, P. (2016). The Politics of Self-Governance.

Warsyena, R., & Wibisono. (2021). Optimalisasi Pelayanan Publik Melalui Pendekatan Kolaboratif Triple Helix: Suatu Identifikasi Dan Mengatasi Patologi Pelayanan Kependudukan Di Desa Sukomaju. Nusantara Hasana Journal, 1(7), 132–137.